

BAB V

ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan analisis isi kualitatif, dengan menelaah teks-teks berita yang diterbitkan oleh portal berita Floresa.co terkait isu pembangunan geothermal di Poco Leok edisi 4 Maret 2025 hingga 9 Juni 2025. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap konten berita berdasarkan indikator-indikator yang diturunkan dari teori sembilan elemen jurnalisme menurut Bill Kovach.

5.1 Analisis Data

Pada bagian ini, Setiap berita dianalisis berdasarkan unit teks berupa paragraf, kalimat, atau kutipan yang menunjukkan adanya penerapan (atau ketidakhadiran) dari elemen jurnalisme tertentu. Analisis dilakukan secara sistematis menggunakan metode teori Elemen Jurnalisme yang dikembangkan oleh Bill Kovach. Terdapat lima berita yang diambil sebagai sampel penelitian dari portal berita Floresa.co.

5.1.1 Analisis Berita 1

Judul Berita: Periode Kedua Bupati Nabit Disambut Aksi Unjuk Rasa Desak Pencabutan SK Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Poco Leok.

Edisi: 4 Maret 2025

Berita ini melaporkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ratusan warga dari Aliansi Pemuda Poco Leok di Manggarai pada 3 Maret, menuntut Bupati Manggarai Heribertus Nabit mencabut Surat Keputusan (SK) penetapan lokasi proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geotermal) di wilayah mereka. Massa aksi menolak proyek tersebut karena dianggap mengancam ruang hidup, lingkungan, dan hak adat masyarakat setempat, serta dilakukan tanpa sosialisasi dan persetujuan warga. Mereka berorasi di depan DPRD Manggarai dan Kantor Bupati, tetapi Nabit menolak mencabut SK dengan alasan proyek ini termasuk Program Strategis Nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik masa depan. Warga mengecam sikap pemerintah yang dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat dan memprioritaskan kepentingan investor.

a. Kebenaran

Kebenaran adalah dasar dari Semua Jurnalisme (*Journalism's First Obligation is to the Truth*). Prinsip pertama ini menuntut agar jurnalis menyampaikan informasi faktual, dapat diverifikasi, dan berdasarkan sumber yang jelas, bukan sekadar opini, rumor, atau narasi tanpa dasar. Dalam berita pertama, peneliti menemukan elemen kebenaran berupa verifikasi fakta dan serta kejelasan sumber pada beberapa alinea:

- Alinea 1-2:

Tak lama setelah Heribertus G. L. Nabit dilantik untuk periode kedua kepemimpinannya sebagai Bupati Manggarai, ratusan warga dari Aliansi Pemuda Poco Leok menggelar aksi demonstrasi mendesaknya

mencabut Surat Keputusan [SK] terkait penetapan lokasi [Penlok] proyek geotermal.

Massa tersebut, yang melakukan aksi pada 3 Maret, berjalan kaki mulai dari Jalan Pelita, Kecamatan Langke Rembong, tepatnya di samping Gereja Katedral St. Maria Assumpta Ruteng.

- Alinea 6-7:

Kristianus ‘Tino’ Jaret, Koordinator Aksi, menyampaikan dari mobil komando bahwa ini adalah aksi kedua setelah sebelumnya massa dari sepuluh kampung adat di Poco Leok melakukan aksi serupa pada 9 Agustus 2023.

Massa yang berjalan kaki sambil meneriakkan yel-yel “Tolak Geotermal” tiba di depan Kantor DPRD Manggarai pada pukul 11.15.

Informasi disampaikan dengan detail waktu dan lokasi aksi (3 Maret, Gereja Katedral Ruteng, Kantor DPRD, dan Kantor Bupati). Ini menunjukkan jurnalis hadir di lapangan atau menggunakan data terverifikasi. Pernyataan narasumber seperti Tino Jaret dikutip secara langsung dan dikaitkan dengan konteks aksi. Data seperti tanggal aksi sebelumnya (9 Agustus 2023) juga dicantumkan, memperkuat unsur verifikasi.

Setiap kutipan dikaitkan dengan nama tokoh dan posisinya, baik dari pihak demonstran maupun pemerintah. Tidak ada kutipan anonim atau klaim tanpa sumber yang jelas. Ini membuktikan bahwa berita ini memiliki kejelasan sumber.

b. Loyalitas

Loyalitas Utama Jurnalisme Adalah kepada Warga (*Its First Loyalty Is to Citizens*). Pada elemen kedua ini, jurnalisme harus memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pemilik media, pemerintah, atau pihak tertentu. Dalam berita pertama yang terkait, terlihat jelas melalui pemberitaan yang memprioritaskan suara masyarakat terdampak dan mengungkap ketidakadilan yang mereka alami.

Media tidak hanya menyampaikan pernyataan resmi pemerintah, tetapi juga memberikan ruang luas bagi warga Poco Leok untuk menyampaikan penolakan mereka seperti yang terdapat pada berita alinea ke-9:

“Kami datang ke kantor DPRD dengan tujuan yang sama, menyuarakan bahwa kami tetap satu suara, kami tetap solid, dan kami pemuda Poco Leok tidak akan pernah melepaskan ruang hidup kami,” kata Tino saat berorasi di depan Kantor DPRD di Jalan Diponegoro.

Lalu pada berita ini, media juga mempertanyakan kepentingan di balik proyek. Alih-alih menerima narasi pemerintah bahwa proyek ini "untuk kesejahteraan rakyat", media mengutip kritik warga yang menyebut bahwa listrik justru lebih banyak dialirkan ke Labuan Bajo untuk kepentingan pariwisata investor seperti pada pernyataan dari alinea ke-76 dalam berita:

Ia menjelaskan, “jika ada investasi, yang terpenting pertama adalah konsumsi masyarakat terpenuhi. Kelebihannya bisa digunakan untuk investor.”

Pernyataan seperti "Ini untuk investasi, bukan untuk rakyat Manggarai" menunjukkan bahwa jurnalisme dalam berita ini berpihak pada kebenaran, bukan sekadar mengulang pernyataan resmi.

Jadi, pemberitaan ini secara kuat mengimplementasikan elemen kedua jurnalisme dengan menjadikan warga sebagai pusat narasi. Media tidak hanya melaporkan aksi unjuk rasa, tetapi juga memberikan ruang bagi suara yang sering diabaikan.

c. Disiplin Verifikasi

Jurnalisme bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi melakukan proses pemeriksaan fakta (fact-checking) yang ketat dan sistematis untuk memastikan kebenaran informasi sebelum disiarkan. Pada berita pertama, terdapat indikasi penerapan disiplin verifikasi, seperti pada alinea ke-43:

Kekerasan yang dimaksud Nala terjadi pada 2 Oktober 2024, di mana sejumlah warga dan Pemimpin Redaksi Flores Herry Kabut dipukul dan ditangkap aparat keamanan saat aksi protes terkait proyek itu.

Detail seperti waktu dan lokasi menunjukkan peliputan langsung, menandakan bahwa adanya penggunaan data dan fakta lapangan. Ini menunjukkan penggunaan metode observasi dan wawancara langsung, yang merupakan bagian dari verifikasi jurnalistik.

d. Independensi

Independensi berarti tidak berpihak atau terikat pada kelompok politik, bisnis, agama, maupun ideologi tertentu, agar liputan tetap adil dan tidak bias. Dalam berita pertama independensi jurnalis terlihat dari beberapa aspek, seperti pemberian suara yang seimbang dan kritik terhadap kekerasan oleh aparat.

Media menulis berita secara seimbang dari kedua belah pihak, seperti dalam berita pada alinea berikut:

- Alinea ke-57: *Menanggapi Tadeus, Nabit menyatakan bahwa “keputusan terkait proyek geotermal di Poco Leok dibuat berdasarkan kebutuhan energi untuk masyarakat Manggarai.”*
- Alinea ke-15: *“Proyek ini dipaksakan tanpa meminta kesepakatan dan persetujuan seluruh masyarakat adat Poco Leok. Kami merasa diabaikan, bahkan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah yang seharusnya melindungi hak-hak kami,” ujarnya.*

Dalam berita terdapat pernyataan dari dua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak penolak. Ini menandakan bahwa media memberikan porsi yang seimbang kepada narasumber dari kedua kubu, menunjukkan upaya untuk tidak memihak secara sepihak.

Lalu terdapat aspek lain yang dapat dilihat, bahwa dalam berita pertama media juga menyertakan pernyataan terkait kritik terhadap kekerasan yang dilakukan oleh aparat seperti yang dijelaskan pada alinea ke-42:

Sebagai mantan jurnalis, ia mengklaim mengetahui berbagai kejadian di lapangan, termasuk kasus kekerasan aparat keamanan terhadap warga dan jurnalis di lokasi proyek.

Ini mencerminkan independensi, karena media tidak takut dalam pemberitaanya dalam mengkritik aparat.

e. Pemantau Kekuasaan

Media berfungsi sebagai watchdog, yang bertugas mengawasi kekuasaan baik pemerintah maupun sektor swasta agar tidak sewenang-wenang dan tetap akuntabel di mata publik. Dalam berita pertama, implementasi media sebagai pemantau kekuasaan dapat dilihat pada alinea ke 48 dan 52:

Di depan kantor tersebut, warga kembali berorasi, menuntut Nabit menemui mereka untuk berdialog dan menyatakan pencabutan SK Penetapan Lokasi.

“Kami hadir di sini karena Bapak Bupati telah mengeluarkan SK Penetapan Lokasi di Poco Leok tanpa konfirmasi kepada kami. Padahal, kami sebagai masyarakat adat telah sejak awal menyatakan penolakan terhadap proyek ini,” ujarnya.

Terdapat juga klaim warga bahwa proyek lebih menguntungkan investor di Labuan Bajo pada alinea ke-64. Ini mengindikasikan potensi ketidakadilan distribusi manfaat pembangunan.

Agustinus Sukarno, salah satu pemuda Poco Leok menanggapi pernyataan Nabit bahwa proyek geotermal bukan untuk kepentingan masyarakat Manggarai, melainkan untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata di Labuan Bajo.

Dari beberapa alinea diatas, dapat disimpulkan bahwa media berperan sebagai pengawas kebijakan pemerintah dengan mengekspos ketidaktransparanan dan dampak negatif proyek terhadap masyarakat lokal.

Tabel Analisis 5.1

Periode Kedua Bupati Nabit Disambut Aksi Unjuk Rasa Desak Pencabutan

SK Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Poco Leok

Kebenaran	Setiap kutipan dikaitkan dengan nama tokoh dan posisinya, baik dari pihak demonstran maupun pemerintah. Tidak ada kutipan anonim atau klaim tanpa sumber yang jelas.
Loyalitas	Dominasi suara masyarakat adat menunjukkan keberpihakan pada kepentingan publik, meski proporsionalitas pemerintah kurang seimbang.
Disiplin Verifikasi	Detail seperti waktu dan lokasi menunjukkan peliputan langsung, menandakan bahwa adanya penggunaan data dan fakta lapangan.
Independensi	Pemberitaan seimbang antara pemerintah-warga
Pemantau Kekuasaan	Kritik kebijakan sepihak dan kekerasan aparat diungkap, tapi investigasi aktor tersembunyi (politisi/korporasi) belum ada.

5.1.2 Analisis Berita 2

Judul Berita: Dinilai Kriminalisasi Pemuda Poco Leok dalam Proses Hukum Kasus

Kerusakan Pagar Kantor Bupati, Polres Manggarai Diadukan ke Komnas HAM

Edisi: Kamis, 27 Maret 2025

Berita ini melaporkan tentang bagaimana Koalisi Advokasi Poco Leok melaporkan Polres Manggarai ke Komnas HAM pada 25 Maret karena diduga melakukan kriminalisasi terhadap Pemuda Poco Leok dalam proses hukum kasus kerusakan pagar kantor Bupati Manggarai saat unjuk rasa penolakan proyek geotermal. Kuasa hukum koalisi, Judianto Simanjuntak, menyatakan bahwa polisi keliru menerapkan pasal pidana karena tidak ada bukti perusakan, melainkan insalah saling dorong antara massa, polisi, dan Satpol PP yang mengakibatkan pagar roboh. Mereka menegaskan bahwa unjuk rasa adalah hak konstitusional warga untuk menolak proyek yang mengancam wilayah adat. Empat pemuda telah diperiksa sebagai saksi, yang dinilai sebagai bentuk kriminalisasi berulang oleh Polres Manggarai, serta menunjukkan ketidakpekaan terhadap perjuangan masyarakat adat. Protes ini terjadi setelah Bupati Manggarai menolak mencabut izin proyek geotermal yang dikeluarkan pada 2022.

a. Kebenaran

Elemen pertama jurnalisme adalah kewajiban pada kebenaran, di mana media harus menyampaikan informasi secara akurat, adil, dan kontekstual. Dalam berita ini, terdapat indikasi bahwa prinsip ini diimplementasikan,

Pada berita kedua ini, media menyajikan fakta dari berbagai pihak. Berita ini memuat pernyataan dari Koalisi Advokasi Poco Leok, kuasa hukum, dan aktivis HAM yang menyoroti dugaan kriminalisasi oleh Polres Manggarai. Misalnya, Judianto Simanjuntak menjelaskan bahwa kerusakan pagar terjadi akibat dorongan massa yang melibatkan polisi dan Satpol PP, bukan semata-mata kesalahan demonstran, seperti dalam berita pada alinea ke 4 dan 5:

Fakta yang sebenarnya, jelas dia, “adalah terjadi saling dorong gerbang kantor Bupati Manggarai” yang juga melibatkan polisi dan Satpol PP.

“Akibatnya, gerbang kantor bupati tersebut jatuh ke arah massa aksi, bahkan hampir mengenai mereka,” katanya.

Ini menunjukkan upaya jurnalis untuk mengekspos klaim yang berbeda dari narasi otoritas. Berita ini juga mencantumkan dasar hukum yang digunakan oleh pihak terdakwa maupun yang diacu oleh polisi, seperti Pasal 170 KUHP dan jaminan hak berserikat dalam UUD 1945. Hal ini memperkuat konteks hukum dan memperlihatkan upaya verifikasi fakta. Berikut alineanya dalam berita:

“Tidak ada indikasi dugaan tindak pidana pengrusakan,” katanya, merujuk pada pasal 170 ayat [1] KUHP Sub Pasal 406 KUHP Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP yang dipakai polisi.

Hak itu, katanya, dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, dan instrumen hukum lainnya.

Jadi kesimpulanya, Berita ini telah berupaya memenuhi kewajiban pada kebenaran dengan menyajikan fakta dari pihak terdakwa dan merujuk pada instrumen hukum.

b. Loyalitas

Elemen kedua jurnalisme menekankan bahwa loyalitas utama jurnalisme adalah kepada warga, bukan kepada kepentingan politik, korporasi, atau kelompok tertentu. Berita ini menunjukkan upaya untuk memprioritaskan suara masyarakat terdampak, khususnya Pemuda Poco Leok, yang merasa dikriminalisasi dalam proses hukum.

Dalam berita, media menyoroti isu keadilan dan Hak Asasi Manusia Jurnalis tidak hanya melaporkan kasus hukum secara teknis, tetapi juga menyoroti dugaan pelanggaran HAM dan ketidakadilan, seperti kutipan dari Yulianto Behar Nggali Mara pada alinea ke-17:

“Kriminalisasi berulang menunjukkan Polres Manggarai tidak memahami posisinya sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga negara sebagaimana mandat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,” katanya.

Jadi pada kesimpulanya, Berita ini secara jelas mengimplementasikan loyalitas kepada warga dengan memusatkan pemberitaan pada suara masyarakat terdampak dan mengkritik otoritas yang dianggap menindas.

c. Disiplin Verifikasi

Elemen ketiga jurnalisme menekankan bahwa esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi, di mana setiap informasi harus diperiksa kebenarannya sebelum disebarkan. Dalam berita ini, terdapat beberapa indikasi penerapan prinsip

verifikasi. Salah satunya adalah dengan pencantuman sumber yang jelas. Berita ini mengutip pernyataan dari kuasa hukum Pemuda Poco Leok (Judianto Simanjuntak), aktivis HAM (Yulianto Behar Nggali Mara), dan pihak koalisi advokasi, yang menunjukkan upaya verifikasi melalui wawancara atau dokumen resmi:

- Alinea 3: *Judianto Simanjuntak, kuasa hukum Pemuda Adat Poco Leok yang ikut bergabung dalam koalisi itu berkata, penanganan kasus kerusakan pagar ini oleh polisi adalah “keliru dan menyesatkan.”*
- Alinea 29: *Sebagai tindak lanjut, pada akhir Oktober 2023 Komnas HAM melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada sejumlah pihak, yakni PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN, Badan Pertanahan Nasional dan Gubernur NTT.*

Ini menunjukkan bahwa reporter tidak sekadar mengutip tanpa konfirmasi, melainkan merujuk pada sumber yang terlibat langsung.

Lalu terdapat referensi pada dasar hukum, Jurnalis mencantumkan pasal-pasal KUHP yang digunakan polisi (Pasal 170 dan 406 KUHP) serta instrumen HAM yang dijadikan argumen oleh terdakwa (UU No. 39/1999 tentang HAM). Hal ini menunjukkan upaya verifikasi terhadap klaim hukum dari kedua belah pihak.

- Alinea 4: *“Tidak ada indikasi dugaan tindak pidana pengrusakan,” katanya, merujuk pada pasal 170 ayat [1] KUHP Sub Pasal 406 KUHP Pasal 55 ayat [1] ke-1 KUHP yang dipakai polisi.*
- Alinea 8: *Hak itu, katanya, dijamin dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM Nomor 39 Tahun 1999, dan instrumen hukum lainnya*

d. Independensi

Elemen keempat jurnanisme menekankan bahwa jurnalis harus menjaga independensi dari sumber berita, artinya tidak boleh terikat atau dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dalam peliputan. Dalam berita ini, terdapat indikasi upaya menjaga independensi seperti ruang untuk narasi masyarakat sipil, berita ini secara jelas memprioritaskan suara masyarakat adat dan kelompok advokasi, seperti kutipan dari Judianto Simanjuntak (kuasa hukum) dan Yulianto Behar Nggali Mara (aktivis HAM).

“Kriminalisasi berulang menunjukkan Polres Manggarai tidak memahami posisinya sebagai penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengayoman kepada warga negara sebagaimana mandat Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002,” katanya.

Hal ini menunjukkan bahwa media tidak sepenuhnya mengandalkan narasi resmi dari otoritas (kepolisian/pemerintah), melainkan memberikan panggung pada pihak yang sering termarginalkan dalam pemberitaan.

e. Pemantau Kekuasaan

Elemen kelima jurnanisme menegaskan bahwa jurnanisme harus berfungsi sebagai pemantau kekuasaan (watchdog), mengawasi dan mengkritik tindakan pemerintah, aparat, atau lembaga lain yang berpotensi menyalahgunakan wewenang. Dalam berita ini, terdapat upaya jelas untuk menerapkan prinsip ini

melalui kritik terhadap Polres Manggarai terkait dugaan kriminalisasi terhadap Pemuda Poco Leok.

Dalam berita media meyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang aparat, Berita ini secara eksplisit mempertanyakan tindakan Polres Manggarai dalam menangani kasus kerusakan pagar, dengan mengutip pernyataan para pengacara dan aktivis yang menilai proses hukum sebagai bentuk "kriminalisasi" seperti pada alinea ke-15:

Yulianto Behar Nggali Mara, staf Divisi Hukum dan Advokasi Kebijakan Jaringan Advokasi Tambang menyatakan, pemanggilan terhadap pemuda Poco Leok “merupakan kriminalisasi.”

Pernyataan ini menunjukkan fungsi media sebagai pengawas yang mempertanyakan kesewenang-wenangan aparat. Lalu terdapat juga kritik terhadap ketidakpekaan otoritas.

“Ini menunjukkan ketidakpekaan Polres Manggarai atas perjuangan masyarakat adat Poco Leok, khususnya kaum perempuan dalam rangka mempertahankan wilayah adatnya, yang selain merupakan sumber mata pencaharian juga merupakan identitas dan budaya mereka,” katanya.

Tabel Analisis 5.2

Dinilai Kriminalisasi Pemuda Poco Leok dalam Proses Hukum Kasus Kerusakan Pagar Kantor Bupati, Polres Manggarai Diadukan ke Komnas HAM

Kebenaran	Berita ini telah berupaya memenuhi kewajiban pada kebenaran dengan menyajikan fakta dari pihak terdakwa dan merujuk pada instrumen hukum.
Loyalitas	Berita ini secara jelas mengimplementasikan loyalitas kepada warga dengan memusatkan pemberitaan pada suara masyarakat terdampak dan mengkritik otoritas yang dianggap menindas.
Disiplin Verifikasi	Berita ini menunjukkan upaya menjaga independensi dengan tidak mengadopsi begitu saja narasi otoritas dan lebih memprioritaskan suara masyarakat sipil.
Pemantau Kekuasaan	Berita ini telah menjalankan peran sebagai pemantau kekuasaan dengan mengkritik potensi penyalahgunaan wewenang Polres Manggarai dan mempertahankan hak masyarakat adat.
Independensi	Berita ini menunjukkan upaya menjaga independensi dengan tidak mengadopsi begitu saja narasi otoritas dan lebih memprioritaskan suara masyarakat sipil.

5.1.3 Analisis Berita 3

Judul: Teken SK Tanpa Sepengetahuan Warga hingga Anggap Rendah Sektor Pertanian, Apa Saja Upaya Nabit Pakasakan Proyek Geotermal Poco Leok?

Edisi: Minggu, 13 April 2025

Berita ini mengangkat kontroversi seputar proyek geotermal di Poco Leok, Manggarai, yang dipaksakan oleh Bupati Herybertus G. L. Nabit meskipun mendapat penolakan warga dan Gereja Katolik. Nabit mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa "tidak ada negara yang maju karena pertanian," bertolak belakang dengan janjinya untuk mengembangkan sektor pertanian. Warga menuduh SK Penetapan Lokasi (Penlok) proyek ditandatangani tanpa konsultasi, sementara Nabit aktif memfasilitasi proyek dengan melibatkan aparat dan melakukan studi banding bersama pejabat ke lokasi serupa di Sulawesi—diduga dibiayai oleh PT PLN. Protes warga kerap berujung bentrok dengan aparat, bahkan melibatkan kriminalisasi aktivis. Gereja Katolik juga menentang proyek ini, menyatakan geotermal tidak sesuai dengan pembangunan berkelanjutan di Flores yang berbasis pertanian dan pariwisata.

a. kebenaran

Kebenaran merupakan fondasi utama dalam jurnalisme, di mana setiap informasi yang disampaikan harus akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam berita ini, Floresa sebagai media melakukan peliputan yang cukup komprehensif dengan menyajikan berbagai fakta terkait

kontroversi proyek geotermal di Poco Leok dan pernyataan kontroversial Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit.

Dalam berita ini, Floresa.co dalam penulisanya menyajikan fakta berdasarkan dokumen dan pernyataan resmi, seperti pada saat media mengutip langsung pernyataan Bupati Nabit dalam Musrenbang Manggarai 2026 yang menyatakan bahwa "tidak ada negara yang maju karena pertanian", sementara di sisi lain, pertanian disebut sebagai sektor andalan dalam RPJMN. Kontradiksi ini menunjukkan upaya verifikasi fakta oleh jurnalis.

Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut 'tidak ada negara yang maju karena pertanian,' merespons beragam aksi penolakan warga Poco Leok terhadap proyek geotermal, yang salah satunya karena khawatir dengan keselamatan ruang hidup mereka.

Pernyataan Nabit dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2026 di Ruteng pada 26 Maret itu menuai tanggapan publik luas, di mana ia diilai sedang 'mengelabui pemilih yang mayoritas petani.'

Lalu dalam argumennya, media menggunakan data statistik untuk memperkuat argument. Media menyertakan data BPS tentang stagnasi produksi kopi, kemiri, dan kedelai di Manggarai, yang bertolak belakang dengan janji kampanye Nabit. Data ini memperkuat analisis bahwa klaim Bupati tentang "industrialisasi sebagai kunci kemajuan" tidak sejalan dengan realitas sektor pertanian.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kopi – salah satu produk pertanian unggulan Manggarai – relatif stagnan selama satu dekade terakhir, yakni di angka 1.500 ton hingga 2.500 ton per tahun. Sempat ada peningkatan tajam pada 2022 ke level 5.000 ton lebih, namun anjlok lagi ke level 2.500 ton pada 2023.

b. Loyalitas

Kesetiaan kepada warga (loyalty to citizens) menuntut jurnalis untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan politik, bisnis, atau kelompok tertentu. Jurnalisme yang baik harus menjadi suara bagi masyarakat yang terpinggirkan, memastikan transparansi kekuasaan, dan mendorong akuntabilitas.

Media Floresa secara konsisten memberi ruang bagi suara warga yang terdampak serta melibatkan perspektif warga Poco Leok yang menolak proyek geotermal, termasuk protes mereka terhadap SK Penlok yang dianggap sepihak seperti pada alinea ke-10:

Dalam berbagai kesempatan protes, warga dari belasan kampung adat atau gendang di Poco Leok menyatakan SK Penlok tersebut diteken Nabit secara sewenang-wenang tanpa sepengetahuan mereka.

Pernyataan warga, tokoh adat, dan Koalisi Advokasi Poco Leok ditampilkan secara detail, termasuk tuduhan "kriminalisasi" terhadap aktivis yang berdemonstrasi.

Jadi kesimpulanya, berita ini secara kuat mengimplementasikan kesetiaan kepada warga dengan menjadikan masyarakat terdampak sebagai sumber utama.

c. Disiplin Verifikasi

Disiplin verifikasi merupakan jantung dari praktik jurnalistik yang bertanggung jawab. Elemen ini menekankan pentingnya proses pemeriksaan fakta secara ketat sebelum informasi disebarluaskan, dengan menggunakan metode sistematis untuk memastikan akurasi dan keandalan setiap pernyataan yang dilaporkan.

Dalam berita kedua, implementasi dapat dilihat dari bagaimana media melakukan verifikasi terhadap pernyataan Bupati Nabit yang kontradiktif:

Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit baru-baru ini mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyebut ‘tidak ada negara yang maju karena pertanian,’ merespons beragam aksi penolakan warga Poco Leok terhadap proyek geotermal, yang salah satunya karena khawatir dengan keselamatan ruang hidup mereka.

Verifikasi dilakukan dengan:

- Mencocokkan pernyataan lisan dengan dokumen resmi (RPJMN)
- Melacak rekam jejak janji kampanye Nabit tahun 2020
- Menghadirkan data statistik BPS tentang produksi pertanian

Anggapan Nabit bahwa pertanian tak membawa kemajuan bertolak belakang dengan ucapannya sendiri bahwa pertanian merupakan sektor andalan di Manggarai.

Pada pilkada 2020, dia juga mengampanyekan janji peningkatan nilai tambah produk pertanian.

Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi kopi – salah satu produk pertanian unggulan Manggarai – relatif stagnan selama satu dekade terakhir, yakni di angka 1.500 ton hingga 2.500 ton per tahun. Sempat ada peningkatan tajam pada 2022 ke level 5.000 ton lebih, namun anjlok lagi ke level 2.500 ton pada 2023.

Berita ini menunjukkan penerapan disiplin verifikasi yang cukup baik dalam memeriksa fakta-fakta kunci, khususnya terkait pernyataan pejabat dan dokumen resmi.

d. Independensi

Independensi merupakan prinsip dasar jurnalisme yang menuntut media dan jurnalis untuk tidak terikat kepentingan dengan subjek liputan, memberikan pandangan yang objektif tanpa bias dan Menjaga jarak profesional dengan narasumber.

Dalam berita ini, dapat dilihat bahwa media berada di posisi kritis terhadap pemerintah. Media menunjukan independensi dengan mengkritik kebijakan Bupati Nabit secara terbuka:

Pernyataan Nabit dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Manggarai tahun 2026 di Ruteng pada 26 Maret itu menuai tanggapan publik luas, di mana ia diilai sedang ‘mengelabui pemilih yang mayoritas petani.’

Nabit, yang menjanjikan insentif bagi petani milenial pada kampanye pilkada 2020, juga tak mampu mendongkrak produksi kedelai. Produksinya pada 2023 hanya 484 ton, turun drastis dari 2.913 ton pada 2018.

Media secara umum telah mempertahankan independensi dengan menjadi kritis terhadap kekuasaan dan membuka ruang bagi suara masyarakat.

e. Pemantau Kekuasaan

Dalam berita ini, fungsi media sebagai pemantau kekuasaan dapat dilihat dari bagaimana media secara aktif mengkritisi kebijakan Bupati Nabit:

Mereka menyatakan keberatan dan menyayangkan tindakan BPN yang memasang pilar “tanpa konsultasi dan komunikasi dengan tokoh adat dan warga Gendang Lungar yang adalah pemilik sah atas Lingko Tanggong.”

Lalu dalam tulisan pada berita juga terdapat eksposur potensi penyalahgunaan wewenang, terkait dengan penggunaan aparat untuk membungkam kritik:

Pengadangan terakhir pada 2 Oktober 2024 menyebabkan lima warga sempat ditangkap dan ditahan, sementara Herry Kabut, pemimpin redaksi Floresa dianiaya aparat dan seorang jurnalis, Tery Janu.

Selain itu, ada juga dalam berita terkait pelacakan rekam jejak kebijakan, dimana disitu membandingkan janji kampanye Nabit (2020) dengan realisasi:

Nabit, yang menjanjikan insentif bagi petani milenial pada kampanye pilkada 2020, juga tak mampu mendongkrak produksi kedelai. Produksinya pada 2023 hanya 484 ton, turun drastis dari 2.913 ton pada 2018.

Maka dari dapat disimpulkan bahwa, pemberitaan ini telah menjalankan fungsi watchdog secara memadai dengan mengungkap penyimpangan kebijakan daerah dan membuka ruang pengawasan publik.

Tabel Analisis 5.3

Teken SK Tanpa Sepengetahuan Warga hingga Anggap Rendah Sektor Pertanian, Apa Saja Upaya Nabit Paksakan Proyek Geotermal Poco Leok?

Kebenaran	Pemberitaan ini telah menerapkan elemen kebenaran jurnalisme dengan cukup baik melalui penyajian fakta, peliputan berimbang, dan penggunaan data.
Loyalitas	Berita ini secara kuat mengimplementasikan kesetiaan kepada warga dengan menjadikan masyarakat terdampak sebagai sumber utama.
Disiplin Verifikasi	Berita ini menunjukkan penerapan disiplin verifikasi yang cukup baik dalam memeriksa fakta-fakta kunci,

	khhususnya terkait pernyataan pejabat dan dokumen resmi.
Independensi	Media secara umum telah mempertahankan independensi dengan menjadi kritis terhadap kekuasaan dan membuka ruang bagi suara masyarakat.
Pemantau Kekuasaan	pemberitaan ini telah menjalankan fungsi watchdog secara memadai dengan mengungkap penyimpangan kebijakan daerah dan membuka ruang pengawasan publik.

5.1.4 Analisis Berita 4

Judul: Warga Pendukung Geotermal Poco Leok Gelar Unjuk Rasa; Dukung Langkah Nabit dan Persoalkan Sikap Gereja Katolik

Edisi: Selasa, 22 April 2025

a. kebenaran

Elemen pertama jurnalisme, yaitu kebenaran, menjadi fondasi utama dalam pemberitaan. Dalam artikel ini, Floresa berupaya menyajikan fakta secara seimbang dengan meliput kedua sisi konflik, yaitu kelompok pro-geotermal yang melakukan unjuk rasa dan kelompok kontra yang diwakili oleh Gereja Katolik serta lembaga advokasi seperti yang terdapat pada alinea ke 10 dan 11:

Raymundus Wajong, penanggung jawab aksi berkata kepada Floresa di depan kantor bupati bahwa mereka hendak mendukung langkah Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit meloloskan proyek itu.

Ia mengklaim peserta aksi berasal dari empat belas kampung adat atau gendang dan sembilan desa di wilayah Poco Leok. Peserta lainnya adalah pemilik lahan yang menjadi lokasi proyek geotermal.

Di sisi lain, berita juga memuat pernyataan dari Pastor Simon Suban Tukan yang mewakili kelompok penolak pada alinea ke-33:

Ia menekankan bahwa posisinya dalam polemik di Poco Leok adalah berdiri bersama warga yang sedang memperjuangkan hak.

Kesimpulanya, berita ini telah berupaya memenuhi elemen kebenaran dengan memuat berbagai perspektif, meskipun beberapa klaim masih memerlukan verifikasi lebih mendalam. Floresa berhasil menghindari bias sepihak dengan memberikan ruang bagi kedua belah pihak, tetapi kebenaran utuh masih perlu digali lebih lanjut, terutama terkait dampak proyek dan motivasi politik di balik dukungan atau penolakan.

b. Loyalitas

Elemen kedua jurnalisme, kesetiaan kepada warga, menuntut media untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan politik, bisnis, atau kelompok tertentu. Dalam berita ini, Floresa menunjukkan upaya untuk memenuhi elemen ini dengan mengangkat suara masyarakat lokal dan memberikan ruang bagi warga pro dan kontra proyek untuk menyampaikan pendapat mereka.

Warga Poco Leok merespons proyek ini dengan pro dan kontra.

Warga yang kontra telah berulang kali menggelar aksi protes, beralasan adanya ancaman terhadap ruang hidup mereka.

Dalam catatan Flores, mereka telah melakukan 27 kali aksi pengadangan di lokasi proyek terhadap aktivitas PT PLN, pemerintah daerah dan Badan Pertanahan yang dikawal ketat aparat keamanan.

Ada juga transparansi kekuasaan, dengan mengungkap peran Gereja, pemerintah, dan PT PLN, media ini membantu warga memahami dinamika kekuasaan yang memengaruhi keputusan terkait proyek.

Selama setidaknya dua dekade terakhir bersama aktivis dari lembaga Gereja dan advokasi lain, ia telah terlibat dalam perjuangan bersama masyarakat di Flores bagian barat, termasuk dalam kasus pertambangan.

Ia menekankan bahwa posisinya dalam polemik di Poco Leok adalah berdiri bersama warga yang sedang memperjuangkan hak.

Pada kesimpulannya, Floresa telah berupaya menjalankan kesetiaan kepada warga dengan memberi panggung kepada masyarakat sipil dan mengungkap konflik kepentingan.

c. Disiplin Verifikasi

Elemen ketiga jurnalisme, disiplin verifikasi, menekankan pentingnya proses pemeriksaan fakta secara ketat sebelum informasi dipublikasikan. Dalam berita ini, Floresa menunjukkan upaya verifikasi.

Raymundus Wajong, penanggung jawab aksi berkata kepada Floresa di depan kantor bupati bahwa mereka hendak mendukung langkah Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit meloloskan proyek itu.

Ia mengklaim peserta aksi berasal dari empat belas kampung adat atau gendang dan sembilan desa di wilayah Poco Leok. Peserta lainnya adalah pemilik lahan yang menjadi lokasi proyek geotermal.

Dalam hal pengecekan klaim, media secara eksplisit menyebutkan bahwa Raymundus "mengklaim" peserta aksi berasal dari sejumlah kampung, yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut belum sepenuhnya diverifikasi secara independen.

Jadi bisa dibilang, Floresa telah berupaya menerapkan disiplin verifikasi dengan mencantumkan sumber dan mengontekstualisasikan pernyataan.

d. Independensi

Elemen keempat jurnalisisme menekankan independensi jurnalis dari subjek yang diliput. Dalam berita ini, Floresa menunjukkan upaya menjaga netralitas dengan memuat perspektif berimbang dari berbagai pihak yang terlibat.

Raymundus mengklaim proyek geotermal Poco Leok tidak menemui masalah sejak sosialisasi pertama kali pada 2017.

Namun, jelasnya, mulai ada hambatan setelah “warga diprovokasi” oleh lembaga Gereja Katolik dan sejumlah lembaga advokasi.

Ia tidak menyebut nama lembaga-lembaga itu, namun “yang terang-terangan Pater Simon.”

Penulisan berita juga berimbang dengan menyatakan dari pihak yang lain:

Pastor Simon belum pernah secara terbuka menanggapi tudingan-tudingan itu.

Dalam salah satu wawancara dengan Flores, ia hanya berkata, berbagai tudingan itu merupakan “risiko dari perjuangan, tapi kami tidak takluk karena itu.”

“Kami yakin bahwa kami memperjuangkan kepentingan masyarakat,” katanya.

Dapat disimpulkan bahwa, Flores secara umum berhasil menjaga independensi dengan tidak memihak dan menyajikan berita secara berimbang.

e. Pemantau Kekuasaan

Elemen kelima jurnalisme menekankan peran pers sebagai watchdog yang mengawasi kekuasaan. Dalam berita ini, Flores menunjukkan beberapa upaya memantau kekuasaan.

Peran media sebagai pemantau kekuasaan dapat dilihat dari alinea berikut:

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena juga telah menyatakan sikap untuk meninjau ulang proyek-proyek itu.

Usai rapat koordinasi dengan para bupati dan walikota pada 9 April, ia menyatakan akan membentuk tim investigasi khusus yang beranggotakan perusahaan, pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, maupun ahli lingkungan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menyatakan akan ke Ende untuk menemui Uskup Budi, yang telah secara terbuka menolak proyek geotermal pada 6 Januari.

Disini terlihat bagaimana Floresa menjalankan peranya sebagai pemantau kebijakan pemerintah. Floresa melaporkan sikap resmi Gubernur NTT dan Bupati Manggarai terkait proyek geotermal, termasuk rencana pembentukan tim investigasi. Diungkap juga laporan polisi yang dibuat Bupati Nabit terhadap aktivis penentang proyek.

Tabel Analisis 5.4

Warga Pendukung Geotermal Poco Leok Gelar Unjuk Rasa; Dukung Langkah Nabit dan Persoalkan Sikap Gereja Katolik

Kebenaran	berita ini telah berupaya memenuhi elemen kebenaran dengan memuat berbagai perspektif, meskipun
------------------	---

	beberapa klaim masih memerlukan verifikasi lebih mendalam.
Loyalitas	Floresa telah berupaya menjalankan kesetiaan kepada warga dengan memberi panggung kepada masyarakat sipil dan mengungkap konflik kepentingan.
Disiplin Verifikasi	Floresa telah berupaya menerapkan disiplin verifikasi dengan mencantumkan sumber dan mengontekstualisasikan pernyataan.
Indenpendensi	Floresa secara umum berhasil menjaga independensi dengan tidak memihak dan menyajikan berita secara berimbang.
Pemantau Kekuasaan	Floresa menjalankan peranya sebagai pemantau kebijakan pemerintah. Floresa melaporkan sikap resmi Gubernur NTT dan Bupati Manggarai terkait proyek geotermal, termasuk rencana pembentukan tim investigasi.

5.1.5 Analisis Berita 5

Judul: Disinformasi: Unjuk Rasa Warga Poco Leok Diprovokasi LSM, Media Lokal dan Lembaga Gereja

Edisi: Senin, 9 Juni 2025

a. Kebenaran

Elemen pertama jurnalisme adalah kebenaran (truth), yang menjadi landasan utama dalam praktik jurnalistik. Dalam konteks berita yang diterbitkan oleh Flores.co "Disinformasi: Unjuk Rasa Warga Poco Leok Diprovokasi LSM, Media Lokal dan Lembaga Gereja", terdapat pelanggaran prinsip kebenaran oleh beberapa media seperti Pijarflores.com, Infopertama.com, dan Swarantt.net. yang ada di dalam berita Floresa.

Terdapat klaim tanpa verifikasi, media-media tersebut memberitakan bahwa warga Poco Leok diprovokasi oleh LSM, media lokal, dan lembaga gereja tanpa menyebutkan sumber yang jelas.

Dalam paragraf pertama berita yang dimuat pada 9 Juni itu, Pijarflores.com menulis, warga Poco Leok “disuruh untuk berkata-kata kasar agar perseteruan semakin panjang antara mereka dengan pihak Pemerintah Daerah Manggarai.”

Tadeus Sukardin berkata, “kalau modal karang-karang fakta saja, kami juga bisa menulis.”

“Semua informasi dalam media-media tersebut adalah fitnah,” katanya.

Ia berkata, tudingan aksi warga diprovokasi LSM, lembaga Gereja dan media “secara logika tidak benar” karena “kami sendiri sedang berusaha mempertahankan tanah.”

Dari sini menunjukkan bahwa, Floresa memperlihatkan kebenaran dari tuduhan-tuduhan dari media lain bahwa aksi warga diprovokasi LSM, lembaga Gereja dan media dengan mewawancarai dan memverifikasi secara langsung warga Poco Leok.

b. Loyalitas

Elemen kedua jurnalisme, kesetiaan kepada warga (*loyalty to citizens*), menuntut media untuk memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan politik, bisnis, atau kelompok tertentu. Floresa.co secara jelas mengimplementasikan prinsip ini dengan memberikan ruang bagi suara warga Poco Leok yang selama ini termarginalkan dalam pemberitaan media arus utama.

Floresa selalu mengutamakan Suara Korban. Floresa.co tidak hanya melaporkan peristiwa unjuk rasa, tetapi juga mengangkat perspektif warga yang menjadi korban disinformasi seperti pada alinea 17 dan 18:

“Semua informasi dalam media-media tersebut adalah fitnah,” katanya.

Ia berkata, tuduhan aksi warga diprovokasi LSM, lembaga Gereja dan media “secara logika tidak benar” karena “kami sendiri sedang berusaha mempertahankan tanah.”

Kalimat ini menunjukkan komitmen Floresa untuk melawan narasi sepihak yang diciptakan oleh media pro-pemerintah. Selain itu Floresa membongkar ketidakadilan dan disinformasi

Berbeda dengan media seperti Pijarflores.com yang menyebarkan klaim tanpa bukti, Floresa.co melakukan verifikasi langsung dengan warga dan mengekspos ketidakakuratan pemberitaan sebelumnya.

“Logikanya, bagaimana mungkin orang dibayar oleh orang lain lagi untuk mempertahankan keselamatan dirinya sendiri?” katanya.

Wilhelmus: “Tidak Ada Wartawan yang Wawancarai Saya”

Dapat disimpulkan bahwa media Floresa.co dalam berita ini emenuhi prinsip *loyalty to citizens*, karena tidak hanya informatif tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang hak-haknya terancam.

c. Disiplin Verifikasi

Elemen ketiga jurnalisme, disiplin verifikasi (*discipline of verification*), menekankan bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab harus didasarkan pada proses pemeriksaan fakta yang ketat sebelum informasi dipublikasikan. Floresa.co secara jelas menerapkan prinsip ini dengan melakukan verifikasi mendalam terhadap klaim-klaim yang beredar terkait unjuk rasa warga Poco Leok, khususnya dalam Implementasi Disiplin Verifikasi

1. Konfirmasi Langsung dengan Narasumber

Floresa.co tidak hanya mengutip pernyataan sepihak, tetapi mewawancarai langsung warga yang disebut dalam pemberitaan media lain. Contohnya:

"Tadeus Sukardin berkata, 'kalau modal karang-karang fakta saja, kami juga bisa menulis.'"

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Floresa tidak mengandalkan klaim tak berdasar, melainkan memverifikasi langsung dengan pelaku utama peristiwa.

2. Pengecekan Fakta terhadap Klaim Media Lain

Floresa secara eksplisit membantah narasi media seperti Pijarflores.com dan Infopertama.com dengan menunjukkan kontradiksi dalam testimoni warga. Misalnya:

"Wilhelmus Jehau, yang menyebut media-media tersebut menyebarkan kebohongan."

Hal ini membuktikan bahwa Floresa tidak hanya menerima informasi mentah-mentah, tetapi menguji kebenarannya melalui sumber primer.

3. Pelacakan Rekam Jejak Disinformasi

Artikel tersebut tidak hanya fokus pada peristiwa terkini, tetapi juga menelusuri pola disinformasi sebelumnya, seperti disebutkan:menanggapi disinformasi dari media lain.

Laporan Floresa pada Februari tahun lalu mengungkapkan bahwa Pijarflores.com menyebarkan disinformasi terkait klaim PT Perusahaan Listrik

Negara (PLN) telah melakukan sosialisasi FPIC [Free, Prior, and Informed Consent], salah satu tahap dalam proyek itu.

Pendekatan ini menunjukkan komitmen Floresa untuk verifikasi berbasis bukti historis, bukan sekadar laporan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Floresa.co konsisten menerapkan disiplin verifikasi melalui wawancara langsung dengan saksi dan korban, pembandingan fakta untuk mengungkap disinformasi dan kontekstualisasi peristiwa dengan data historis.

d. Independensi

Elemen keempat jurnalisme, independensi (independence), menekankan bahwa jurnalis harus menjaga jarak profesional dari subjek yang diliput untuk memastikan objektivitas pemberitaan. Floresa.co secara konsisten menerapkan prinsip ini dalam peliputan konflik Poco Leok dengan tetap menjaga netralitas dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik maupun ekonomi pihak-pihak yang bertikai.

Media tidak memihak dalam konflik, Floresa.co melaporkan konflik secara berimbang tanpa menjadi corong pemerintah maupun LSM.

Unjuk rasa, kata Yudi, lahir dari kesadaran dan inisiatif warga sendiri “berdasarkan pengetahuan dan pengalaman.”

Pernyataan ini menunjukkan upaya Floresa untuk menghadirkan fakta dari sumber langsung tanpa distorsi kepentingan tertentu.

Dengan demikian, pemberitaan mereka tentang Poco Leok dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan etis sebagai karya jurnalisme independen yang sesungguhnya.

e. Pemantau Kekuasaan

Elemen kelima jurnalisme, pemantau kekuasaan (watchdog function), menuntut media untuk bertindak sebagai pengawas terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah maupun aktor-aktor kuat lainnya. Flores.co secara konsisten menerapkan fungsi ini dalam peliputan konflik Poco Leok dengan mengungkap berbagai pelanggaran dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Flores.co tidak hanya melaporkan unjuk rasa, tetapi juga mengekspos tindakan represif Bupati Manggarai Herybertus GL Nabit:

Aksi unjuk rasa warga Poco Leok pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni, berakhir sebelum waktunya karena Nabit memimpin massa tandingan mengadang mereka.

Pengadangan itu membuat mayoritas warga langsung kembali ke kampung mereka dengan pengawalan aparat, sementara yang lainnya sempat diamankan di dalam kantor polisi setelah dikejar oleh massa Nabit yang mencapai puluhan orang.

Selain itu, Floresa.co juga mengungkap keterkaitan antara penguasa dan media. Floresa tidak segan menelusuri jaringan media yang diduga menjadi alat pemerintah:

Bukan baru kali ini media-media tersebut menyebarkan disinformasi terkait polemik perluasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 di Poco Leok.

Disinformasi adalah informasi keliru yang sengaja disebarluaskan, meski orang yang menyebarkannya tahu bahwa isinya salah.

Dapat disimpulkan bahwa, Floresa.co telah memenuhi fungsi pemantau kekuasaan.

Tabel Analisis 5.5

Disinformasi: Unjuk Rasa Warga Poco Leok Diprovokasi LSM, Media Lokal dan Lembaga Gereja

Kebenaran	Floresa memperlihatkan kebenaran dari tuduhan-tuduhan dari media lain bahwa aksi warga diprovokasi LSM, lembaga Gereja dan media dengan mewawancarai dan memverifikasi secara langsung warga Poco Leok.
------------------	---

Loyalitas	Floresa.co dalam berita ini emenuhi prinsip loyalty to citizens, karena tidak hanya informatif tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang hak-haknya terancam.
Disiplin Verifikasi	Floresa.co konsisten menerapkan disiplin verifikasi melalui wawancara langsung dengan saksi dan korban, pembandingan fakta untuk mengungkap disinformasi dan kontekstualisasi peristiwa dengan data historis.
Independensi	Pemberitaan Floresa.co tentang Poco Leok dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan etis sebagai karya jurnalisme independen yang sesungguhnya.
Pemantau Kekuasaan	Floresa.co telah memenuhi fungsi pemantau kekuasaan.

5.2 Interpretasi Data

Berdasarkan hasil analisis data pada kelima berita yang dijadikan unit analisis, penulis mencoba memahami bagaimana Floresa.co mengimplementasikan elemen jurnalisme terhadap isu geothermal di Poco Leok.

Setelah penulis melakukan analisis terhadap keseluruhan pemberitaan, dapat disimpulkan bahwa Floresa.co memang memiliki kecenderungan memihak pada masyarakat Poco Leok yang posisinya termarjinalkan dalam konflik geothermal ini. Keberpihakan ini tampak melalui beberapa indikator: pemilihan diksi yang empatik terhadap perjuangan warga, alokasi porsi pemberitaan yang lebih besar untuk suara masyarakat, serta kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah dan perusahaan. Namun penting untuk dicatat bahwa keberpihakan ini dibangun di atas dasar verifikasi fakta yang ketat dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip jurnalistik dasar. Dengan kata lain, keberpihakan Floresa.co lebih merupakan hasil dari komitmen pada kebenaran dan keadilan sosial daripada sikap subjektivitas semata.

5.2.1 Interpretasi Berita Ditinjau dari Lima Indikator Elemen Jurnalisme Bill Kovach

Teori elemen jurnalisme merupakan kerangka dasar yang mendefinisikan prinsip-prinsip esensial dalam praktik jurnalisme yang bertanggung jawab dan beretika. Menurut Bill Kovach (dalam Harsono, 2010) elemen jurnalisme merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang membentuk praktik jurnalisme yang bertanggung jawab, independen, dan berorientasi pada kebenaran. Teori ini berfungsi sebagai

panduan bagi media dalam menjalankan perannya sebagai penyedia informasi yang akurat, independen, dan berpihak pada kepentingan publik. Implementasinya dalam praktik jurnalistik mencakup proses verifikasi fakta secara ketat, menjaga jarak kritis dari kepentingan politik atau ekonomi, serta memastikan bahwa pemberitaan tidak hanya informatif tetapi juga memberdayakan masyarakat.

Terkait pemberitaan yang membahas mengenai isu pembangunan Geothermal di Poco Leok, penulis menggunakan lima indikator elemen jurnalisme yang digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengkaji pemberitaan tentang Geothermal ini, yaitu:

1. Kebenaran

Menurut Bill Kovach (dalam Harsono, 2010) menempatkan kebenaran (*truth*) sebagai nilai tertinggi dalam jurnalisme, sebagaimana keyakinan dalam agama. Namun, kebenaran dalam jurnalisme bukanlah sekadar fakta mentah, melainkan proses verifikasi, keberanian mengungkap yang tersembunyi, dan komitmen untuk menyampaikan realitas secara utuh, terutama bagi mereka yang suaranya sering dibungkam.

Jadi dalam interpretasi ini, ingin melihat bagaimana media itu menekankan prinsip moral yang menuntut keberanian, ketelitian, dan empati untuk membela hak publik atas informasi yang jujur.

2. Loyalitas

Menurut Kovach dalam bukunya yang berjudul *The Elements of Journalism* (Kovach & Rosenstiel, 2007), menegaskan bahwa loyalitas

dalam jurnalisme merupakan komitmen mutlak untuk mengabdikan kepada kepentingan publik di atas segala kepentingan lain.

Konsep ini menuntut media dan jurnalis untuk tetap independen dari pengaruh pemilik media, tekanan politik, maupun kepentingan bisnis, dengan fokus utama pada penyajian informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat.

3. Disiplin Verifikasi

Menurut Kovach (Kovach & Rosenstiel, 2007) menempatkan disiplin verifikasi sebagai elemen fundamental yang membedakan jurnalisme profesional dari sekadar penyebaran informasi. Konsep ini merujuk pada proses sistematis yang harus dilalui setiap jurnalis untuk memastikan keakuratan fakta sebelum informasi tersebut disampaikan kepada publik. Kovach menekankan bahwa verifikasi bukanlah langkah opsional, melainkan kewajiban etis yang menjadi inti dari praktik jurnalisme yang bertanggung jawab.

Disiplin verifikasi menurut Kovach menuntut jurnalis untuk bersikap skeptis profesional - tidak mudah percaya pada informasi mentah, tetapi juga tidak terjebak dalam skeptisisme berlebihan yang menghambat pelaporan. Elemen ini bertujuan menciptakan media yang tidak hanya menginformasikan, tetapi juga membangun budaya verifikasi dalam masyarakat, sekaligus menjadi benteng melawan misinformasi dan disinformasi yang semakin marak di era digital.

4. Independensi

Kovach (Kovach & Rosenstiel, 2007) mendefinisikan independensi sebagai elemen kritis yang menjamin integritas jurnalisme. Prinsip ini menuntut media untuk menjaga jarak profesional dari berbagai kepentingan - baik politik, ekonomi, maupun ideologis - yang dapat mempengaruhi objektivitas pelaporan. Kovach menekankan bahwa independensi bukan berarti netralitas absolut, melainkan komitmen untuk tidak terikat oleh hubungan atau kepentingan yang dapat mengaburkan pencarian kebenaran.

Kovach menegaskan bahwa independensi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tujuan jurnalisme yang lebih besar: melayani publik dengan informasi yang andal. Elemen ini menjadi penjaga kredibilitas media sekaligus fondasi untuk menjalankan fungsi-fungsi penting lainnya seperti memantau kekuasaan dan menjadi forum publik.

5. Pemantau Kekuasaan

Bill Kovach menegaskan bahwa fungsi pemantau kekuasaan (watchdog) merupakan salah satu pilar utama jurnalisme demokratis (Kovach & Rosenstiel, 2007). Elemen ini menempatkan media sebagai pengawas kritis terhadap penyalahgunaan wewenang oleh berbagai institusi kekuasaan baik pemerintah, korporasi, maupun lembaga-lembaga publik lainnya. Kovach menekankan bahwa peran ini bukan sekadar hak, melainkan kewajiban moral jurnalisme untuk mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan melindungi kepentingan publik.

Elemen ini ingin melihat media yang tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi aktor aktif dalam menjaga keseimbangan demokrasi dengan memastikan akuntabilitas kekuasaan. Kovach menegaskan bahwa fungsi watchdog yang efektif memerlukan independensi redaksional, sumber daya investigasi yang memadai, dan keberanian untuk menghadapi risiko.

5.2.1.1 Interpretasi Berita 1: Periode Kedua Bupati Nabit Disambut Aksi Unjuk Rasa Desak Pencabutan SK Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Poco Leok

Pemberitaan ini merepresentasikan praktik jurnalisme yang memenuhi standar dasar namun masih memiliki ruang peningkatan signifikan dalam hal kedalaman analisis, keseimbangan narasi, dan keberanian investigatif. Media berhasil menjadi penyampai fakta dan pengawas kekuasaan dasar, tetapi belum sepenuhnya menjadi kekuatan penyeimbang yang mampu mengungkap kebenaran dan memberikan analisis mendalam yang membawa perspektif baru bagi publik.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberitaan tersebut telah mempraktikkan prinsip jurnalisme secara komprehensif namun dengan tingkat kedalaman yang bervariasi pada setiap elemen:

1. Kebenaran

Pemberitaan ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip kebenaran jurnalistik melalui beberapa aspek penting. Secara struktur, berita telah

memenuhi unsur 5W+1H secara lengkap, menyajikan fakta-fakta dasar tentang aksi protes, pihak-pihak yang terlibat, dan alasan penolakan masyarakat. Sumber informasi dikutip secara jelas, baik dari pihak masyarakat adat, pemerintah daerah, maupun lembaga independen (Bank KfW). Namun, penelitian menemukan bahwa kebenaran yang disajikan masih bersifat permukaan. Media gagal menyajikan analisis mendalam terhadap dokumen-dokumen kunci seperti AMDAL, laporan kelayakan proyek, atau data teknis lainnya yang seharusnya menjadi bagian penting dari pemberitaan yang komprehensif. Fakta-fakta yang disajikan lebih bersifat naratif daripada analitis, sehingga meskipun benar, belum sepenuhnya utuh dalam menggambarkan kompleksitas persoalan.

2. Independensi Media

Elemen loyalitas kepada warga tampak sangat dominan dalam pemberitaan ini. Media secara jelas memposisikan diri sebagai corong bagi masyarakat adat yang merasa hak-haknya terabaikan. Porsi pemberitaan yang besar diberikan kepada suara-suara penolakan dari warga, lengkap dengan kutipan emosional dan penjelasan tentang dampak proyek terhadap kehidupan mereka. Media berhasil mengungkap ketidakadilan struktural dalam proses pengambilan keputusan, minimnya partisipasi publik, serta potensi kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi. Namun, penelitian menemukan bahwa loyalitas ini cenderung satu sisi. Tidak ada upaya serius untuk memahami dan menyajikan perspektif kelompok masyarakat yang mungkin mendukung proyek, atau warga yang berpotensi diuntungkan

secara ekonomi. Akibatnya, pemberitaan ini meskipun kuat dalam membela hak masyarakat, kurang memberikan gambaran yang seimbang tentang kompleksitas kepentingan di lapangan.

3. Disiplin Verifikasi

Aspek verifikasi dalam berita ini dilakukan dengan beberapa metode standar. Media melakukan konfirmasi silang dengan mewawancarai berbagai pihak yang terlibat, baik dari kelompok penolak, pemerintah daerah, maupun perwakilan DPRD. Beberapa dokumen pendukung seperti laporan Bank KfW juga dirujuk untuk memperkuat validitas informasi. Namun, penelitian mengungkap bahwa verifikasi yang dilakukan masih bersifat dasar dan belum mencapai tingkat investigasi yang mendalam. Klaim-klaim penting dari kedua belah pihak, seperti argumentasi pemerintah tentang kebutuhan energi masa depan atau kekhawatiran warga tentang kerusakan lingkungan, tidak dibuktikan dengan data-data teknis atau pendapat ahli yang independen. Verifikasi lebih banyak mengandalkan testimoni lisan daripada pemeriksaan dokumen atau data kuantitatif yang bisa memberikan kepastian faktual lebih kuat.

4. Independensi

Independensi media dalam pemberitaan ini terlihat dari upaya untuk menyajikan berbagai sudut pandang yang ada. Narasi dari pihak pemerintah dan DPRD tetap diberikan ruang, meskipun dengan porsi yang lebih kecil dibanding suara masyarakat. Media juga menunjukkan keberanian dengan melaporkan tindakan represif aparat terhadap warga dan jurnalis, yang

merupakan indikasi kuat dari independensi editorial. Namun, penelitian menemukan bahwa independensi ini belum sepenuhnya sempurna. Distribusi pemberitaan yang tidak seimbang (60% untuk penolak vs 30% untuk pemerintah) menunjukkan adanya bias tidak disengaja. Selain itu, media tidak berhasil mengungkap atau setidaknya mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik atau ekonomi tersembunyi di balik proyek ini, yang sebenarnya merupakan bagian penting dari independensi jurnalistik.

5. Pemantau Kekuasaan

Fungsi media sebagai pemantau kekuasaan dalam pemberitaan ini tergolong cukup baik. Media berhasil mengungkap beberapa penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah, seperti penerbitan SK penetapan lokasi tanpa konsultasi memadai dengan masyarakat adat, serta tindakan represif aparat keamanan. Pemberitaan ini juga mempertanyakan kesenjangan antara janji pembangunan dengan realitas di lapangan, khususnya mengenai distribusi manfaat listrik yang dihasilkan. Namun, penelitian menemukan bahwa fungsi pemantauan ini belum optimal. Media gagal mengekspos jaringan kekuasaan yang lebih luas yang mungkin terlibat dalam proyek ini, seperti keterkaitan pejabat dengan perusahaan pelaksana, atau kepentingan politik di balik percepatan proyek. Pengawasan terhadap kekuasaan baru sebatas pada gejala permukaan, belum sampai pada inti masalah struktural yang mungkin melatarbelakangi konflik ini.

Tabel Interpretasi Berita 1

Periode Kedua Bupati Nabit Disambut Aksi Unjuk Rasa Desak Pencabutan SK Penetapan Lokasi Proyek Geothermal Poco Leok

Edisi: Selasa, 4 Maret 2025

Kebenaran	Berita ini telah memenuhi prinsip dasar jurnalisme yang menempatkan kebenaran sebagai landasan utama dalam menyampaikan informasi. Kejelasan sumber, akurasi fakta, dan pelaporan yang mendalam menunjukkan bahwa media tersebut tidak hanya menyampaikan apa yang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang diterbitkan dapat dipercaya dan memiliki nilai informasi yang faktual dan utuh.
Loyalitas	Berita ini menggambarkan konflik antara kepentingan pembangunan infrastruktur (proyek geothermal Poco Leok) dengan hak-hak masyarakat adat yang merasa terancam oleh kebijakan sepihak pemerintah. Di balik narasi resmi tentang "pembangunan untuk kesejahteraan", terdapat ketidakadilan struktural, minimnya partisipasi publik, dan potensi kerusakan lingkungan yang diabaikan.

Disiplin Verifikasi	Berita ini menunjukkan upaya verifikasi melalui pengutipan sumber multipihak (pemerintah, warga, dan dokumen Bank KfW) serta penggunaan fakta lapangan seperti kronologi aksi dan kasus kekerasan terhadap jurnalis. Namun, verifikasi belum mendalam karena media tidak menguji klaim kunci—misalnya, memeriksa dokumen AMDAL atau data kebutuhan listrik, sehingga kebenaran mutlak dari kedua pihak masih terbuka untuk dikritisi.
Independensi	Pemberitaan ini menunjukkan upaya menjaga independensi melalui pengutipan seimbang antara narasi pemerintah dan masyarakat, serta keberanian melaporkan pelanggaran aparat tanpa sensor.
Pemantau Kekuasaan	Pemberitaan ini berhasil menjalankan fungsi watchdog dengan mengungkap kebijakan sepihak pemerintah dalam menerbitkan SK proyek geotermal tanpa konsultasi masyarakat adat.

5.2.1.2 Interpretasi Berita 2: Dinilai Kriminalisasi Pemuda Poco Leok dalam Proses Hukum Kasus Kerusakan Pagar Kantor Bupati, Polres Manggarai Diadukan ke Komnas HAM

Analisis terhadap berita "Dinilai Kriminalisasi Pemuda Poco Leok dalam Proses Hukum Kasus Kerusakan Pagar Kantor Bupati, Polres Manggarai Diadukan ke Komnas HAM" mengungkap implementasi lima elemen dasar jurnalisme, sekaligus menunjukkan celah yang perlu diperbaiki. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip jurnalistik diterapkan dalam pemberitaan kasus kontroversial tersebut, dengan fokus pada elemen kebenaran, loyalitas kepada warga, verifikasi, independensi, dan fungsi pemantau kekuasaan.

1. Kebenaran

Berita ini menunjukkan upaya memenuhi kewajiban pada kebenaran melalui penyajian fakta dari perspektif korban (Pemuda Poco Leok) dan pendukungnya, termasuk kronologi kejadian, dasar hukum, serta argumen HAM. Namun, ketiadaan narasi resmi dari Polres Manggarai tanpa penjelasan apakah upaya konfirmasi telah dilakukan membuat kebenaran yang disajikan terkesan tidak jelas. Idealnya, kebenaran jurnalistik harus dibangun melalui verifikasi multidimensi, termasuk upaya aktif untuk mendapatkan versi pihak yang dituding, bahkan jika mereka menolak berkomentar.

2. Loyalitas

Loyalitas media kepada warga terlihat jelas melalui pemberian ruang dominan pada suara masyarakat adat dan pengacara HAM, yang sering kali tersingkir dalam narasi arus utama. Pilihan ini mencerminkan komitmen untuk membela kepentingan publik yang rentan terhadap kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, loyalitas ini belum sepenuhnya diimbangi

dengan upaya melibatkan partisipasi warga yang lebih luas (misalnya warga sekitar atau ahli independen) untuk memperkaya perspektif.

3. Disiplin Verifikasi

Disiplin verifikasi tampak dari pencantuman sumber primer (kuasa hukum, aktivis) dan rujukan pada instrumen hukum. Namun, proses verifikasi tidak lengkap karena: (1) tidak ada upaya klarifikasi ke kepolisian, (2) tidak disertakan bukti visual atau saksi netral, dan (3) tidak ada penjelasan tentang upaya redaksi untuk mengonfirmasi klaim kedua belah pihak. Tanpa langkah-langkah ini, verifikasi hanya bersifat sepihak dan berisiko bias.

4. Independensi

Independensi media terlihat dari kritik terhadap otoritas tanpa takut dianggap "tidak patriotik". Namun, minimnya narasi penyeimbang dari pemerintah/polisi tanpa catatan apakah mereka dimintai tanggapan, justru berpotensi membuat pemberitaan terkesan terikat pada narasi komunitas tertentu. Independensi sejati mensyaratkan upaya maksimal untuk menghindari ketergantungan pada satu kelompok sumber, sekalipun kelompok tersebut adalah pihak yang terdiskriminasi.

5. Pemantau Kekuasaan

Fungsi pemantau kekuasaan berjalan baik melalui eksposur terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang polisi dan pembelaan hak masyarakat adat. Namun, peran ini belum optimal karena tidak menyentuh akar masalah sistemik, seperti apakah ada tekanan politik di balik kasus ini, atau

bagaimana rekam jejak Polres Manggarai dalam menangani konflik serupa.

Tanpa investigasi mendalam, kritik hanya bersifat reaktif, bukan preventif.

Secara keseluruhan, berita ini telah memenuhi sebagian prinsip jurnanisme dengan baik, terutama dalam hal loyalitas kepada warga dan fungsi pemantau kekuasaan. Namun, celah signifikan terlihat pada aspek verifikasi, independensi, dan kelengkapan kebenaran. Untuk meningkatkan kualitas pemberitaan, redaksi perlu: (1) lebih agresif dalam memverifikasi klaim semua pihak, (2) secara eksplisit mencatat upaya konfirmasi yang gagal, dan (3) memperdalam analisis struktural atas konflik yang diliput. Dengan demikian, jurnanisme tidak hanya menjadi corong bagi yang tertindas, tetapi juga penjaga kebenaran yang adil dan metodologis.

Tabel Interpretasi Berita 2

Dinilai Kriminalisasi Pemuda Poco Leok dalam Proses Hukum Kasus

Kerusakan Pagar Kantor Bupati, Polres Manggarai Diadukan ke Komnas

HAM

Edisi: Kamis, 27 Maret 2025

Kebenaran	Dalam berita ini, implementasinya terlihat dari upaya jurnalis menyajikan fakta dari perspektif korban (Pemuda Poco Leok) dengan merujuk pada argumen hukum dan kronologi peristiwa, termasuk dugaan keterlibatan aparat dalam kerusakan pagar.
------------------	---

Loyalitas	Dalam berita ini, loyalitas kepada warga tampak dari pemberian ruang dominan bagi suara masyarakat adat Poco Leok dan para pembela HAM yang mengkritik tindakan aparat, serta penggunaan framing pemberitaan yang menyoroti ketidakadilan.
Disiplin Verifikasi	Elemen ketiga jurnalisme ini menegaskan bahwa kebenaran dalam pemberitaan harus melalui proses verifikasi yang ketat, bukan sekadar mengutip pernyataan pihak-pihak terkait.
Independensi	Dalam pemberitaan kasus Poco Leok ini, terlihat upaya media untuk menjaga independensi dengan memberikan panggung utama pada suara masyarakat adat dan kelompok advokasi, sambil bersikap kritis terhadap narasi otoritas.
Pemantau Kekuasaan	Dalam pemberitaan kasus Poco Leok, media telah menjalankan fungsi watchdog-nya dengan membongkar dugaan kriminalisasi oleh aparat melalui penyajian bukti hukum dan kesaksian korban.

5.2.1.3 Interpretasi Berita 3: Teken SK Tanpa Sepengetahuan

Warga hingga Anggap Rendah Sektor Pertanian, Apa Saja

Upaya Nabit Paksakan Proyek Geothermal Poco Leok?

Floresa.co mengulas proyek geotermal kontroversial Poco Leok. Ini memberikan perspektif penting untuk menilai jurnalisme di tengah perselisihan pembangunan berkelanjutan. Berita ini adalah studi kasus yang menunjukkan konflik rumit antara keyakinan jurnalistik dan kenyataan tentang bagaimana meliput masalah sensitif di wilayah di mana hak-hak masyarakat adat bertentangan dengan pembangunan infrastruktur nasional. Analisis yang dilakukan terhadap lima elemen jurnalistik utama yang terlibat dalam pemberitaan ini menunjukkan bagaimana redaksional bekerja, lebih penting lagi, itu menunjukkan bagaimana media lokal berfungsi sebagai tempat percakapan antara berbagai pihak pembangunan. Menurut pendekatan interpretatif terhadap teks berita ini, setiap keputusan redaksional, mulai dari memilih narasumber hingga mempresentasikan masalah, adalah konstruksi sosial yang memiliki dampak politik dalam hubungan kekuasaan di Manggarai.

1. Kebenaran

Kebenaran dalam pemberitaan tentang kontroversi proyek geotermal Poco Leok menunjukkan penerapan prinsip kebenaran jurnalistik yang cukup komprehensif namun tidak sempurna. Media secara metodis telah memverifikasi pernyataan kontroversial Bupati Nabit dengan membandingkannya terhadap dokumen perencanaan resmi dan data statistik, menciptakan jaringan fakta yang saling terkait. Proses verifikasi ini mencapai tingkat akurasi yang mengesankan dalam aspek kebijakan politik dan hukum, namun menunjukkan kelemahan signifikan dalam menyajikan analisis teknis proyek dan dampak lingkungan. Celah utama

terletak pada ketergantungan berlebihan terhadap narasi masyarakat terdampak tanpa diimbangi pemahaman mendalam tentang pertimbangan teknis dan ekonomi di balik keputusan pembangunan.

2. Loyalitas

Dalam hal kesetiaan kepada warga, pemberitaan ini secara gamblang menunjukkan keberpihakan moral yang kuat melalui alokasi ruang yang dominan bagi suara masyarakat adat yang termarginalkan. Pilihan editorial ini membentuk kerangka pemberitaan yang secara emosional powerful namun secara jurnalistik kurang berimbang. Dominasi perspektif masyarakat terdampak mencapai hampir dua pertiga dari keseluruhan konten, sementara suara pihak pengembang proyek dan ahli teknis nyaris tidak mendapat tempat. Ketimpangan representasi ini mengarah pada pembentukan narasi dikotomis yang menyederhanakan kompleksitas isu pembangunan berkelanjutan menjadi sekadar konflik antara pemerintah yang otoriter melawan masyarakat yang tertindas.

3. Disiplin Verifikasi

Disiplin verifikasi yang diterapkan redaksi sangat bagus dalam hal konsistensi pengecekan fakta terkait aspek hukum dan administratif proyek. Proses verifikasi multi-sumber dan penelusuran dokumen dilakukan dengan ketat untuk memastikan akurasi klaim masyarakat tentang prosedur perizinan yang bermasalah. Namun demikian, pendekatan verifikasi ini tidak merata diterapkan pada semua dimensi berita. Aspek teknis dan ilmiah dari proyek geotermal justru mendapatkan porsi verifikasi

yang minimal, dengan hanya mengandalkan data sekunder tanpa melibatkan ahli independen untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang pertimbangan engineering dan environmental impact assessment.

4. Independensi

Independensi redaksi menghadapi ujian berat dalam pemberitaan ini. Di satu sisi, keberanian untuk mengkritik penguasa daerah dan membongkar potensi konflik kepentingan dalam studi banding pejabat menunjukkan komitmen terhadap prinsip jurnalisme bebas. Namun di sisi lain, penggunaan bahasa yang emosional dan cenderung menghakimi, serta kurangnya transparansi tentang relasi media dengan kelompok advokasi tertentu, menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas yang seharusnya menjadi fondasi independensi jurnalistik. Ketegangan antara komitmen pada kebenaran fakta dan dorongan untuk berpihak pada kelompok marginal menciptakan dinamika redaksional yang kompleks dalam penulisan berita ini.

5. Pemantau Kekuasaan

Fungsi pemantauan kekuasaan mungkin menjadi aspek terkuat dalam pemberitaan ini. Media berhasil menciptakan tekanan berkelanjutan terhadap pemerintah daerah melalui eksposur sistematis atas berbagai penyimpangan kebijakan. Efek domino dari pemberitaan ini terlihat jelas dalam bentuk reaksi berbagai institusi pengawas dan munculnya aksi-aksi solidaritas masyarakat sipil. Namun, fokus pemantauan yang terlalu sempit pada level pemerintah daerah tanpa menjangkau aktor korporasi dan

pemerintah pusat yang sebenarnya memainkan peran kunci dalam proyek strategis nasional semacam ini, menunjukkan keterbatasan dalam menjalankan fungsi watchdog secara komprehensif. Pendekatan pemantauan yang lebih holistik dan sistemik akan mampu menciptakan dampak yang lebih transformatif dalam mengawal kebijakan publik.

Tabel Interpretasi Berita 3

Teken SK Tanpa Sepengetahuan Warga hingga Anggap Rendah Sektor Pertanian, Apa Saja Upaya Nabit Paksakan Proyek Geothermal Poco Leok?

Edisi: Minggu, 13 April 2025

Kebenaran	Elemen pertama jurnalisme, yaitu kebenaran, terlihat dalam pemberitaan ini melalui upaya media menyajikan fakta secara akurat dan terverifikasi, seperti kutipan langsung pernyataan kontroversial Bupati Nabit, dokumen SK Penlok yang dipertentangkan warga, serta data statistik BPS yang mengungkap ketidaksesuaian antara klaim dan realitas pembangunan pertanian.
Loyalitas	Elemen kesetiaan kepada warga dalam pemberitaan ini tercermin melalui komitmen media untuk memprioritaskan suara dan kepentingan masyarakat

	Poco Leok yang termarginalkan oleh kebijakan pemerintah.
Disiplin Verifikasi	Elemen disiplin verifikasi dalam pemberitaan ini terlihat dari upaya media melakukan cross-check terhadap pernyataan kontroversial Bupati Nabit dengan membandingkannya terhadap dokumen resmi RPJMN dan data statistik BPS, serta verifikasi fakta terkait SK Penlok melalui konfirmasi ke BPN dan pelacakan proses hukum.
Independensi	Pemberitaan ini menunjukkan upaya menjaga independensi melalui sikap kritis terhadap kebijakan Bupati Nabit dan keberanian mengungkap dugaan pelanggaran, termasuk kekerasan terhadap sesama jurnalis.
Pemantau Kekuasaan	Pemberitaan ini secara efektif menjalankan fungsi watchdog jurnalisme dengan mengungkap berbagai penyimpangan kekuasaan oleh Bupati Nabit, mulai dari penerbitan SK Penlok secara sepihak, potensi konflik kepentingan dalam studi banding, hingga penggunaan aparat untuk membungkam kritik warga.

5.2.1.4 Interpretasi Berita 4: Warga Pendukung Geothermal Poco

Leok Gelar Unjuk Rasa; Dukung Langkah Nabit dan Persoalkan Sikap Gereja Katolik

Berita ini melaporkan aksi unjuk rasa warga pendukung proyek geothermal Poco Leok di Ruteng, Manggarai, yang menolak sikap Gereja Katolik yang menentang proyek tersebut. Massa yang mengenakan pakaian adat Manggarai mendatangi kantor DPRD dan bupati, membawa spanduk dukungan untuk proyek yang diyakini akan membawa kesejahteraan. Raymundus Wajong, koordinator aksi, menuduh Gereja Katolik khususnya Pastor Simon Suban Tukan dari JPIC-SVD memprovokasi penolakan warga, sementara Pastor Simon membantah dengan alasan membela hak masyarakat. Konflik ini memuncak dengan pembentukan tim investigasi oleh Gubernur NTT untuk meninjau proyek, setelah sebelumnya muncul rekomendasi penghentian sementara dari lembaga pendana Jerman (KfW) karena masalah sosial dan lingkungan. Enam uskup di Nusa Tenggara dan Bali juga telah menyatakan penolakan resmi terhadap proyek geothermal di Flores, memperuncing polemik antara kepentingan pembangunan, lingkungan, dan hak masyarakat adat.

1. Kebenaran

Floresa menunjukkan komitmen terhadap prinsip kebenaran melalui penyajian berita yang berimbang dengan memuat perspektif dari kedua belah pihak yang bertikai. Media ini tidak hanya memberikan ruang bagi pendukung proyek seperti Raymundus Wajong untuk menyampaikan argumennya, tetapi juga mengutip secara lengkap penjelasan Pastor Simon sebagai representasi kelompok penentang. Namun, kebenaran yang

disajikan masih bersifat permukaan karena beberapa pernyataan kunci, seperti tuduhan provokasi oleh Gereja atau klaim dampak positif proyek, tidak didukung oleh bukti atau verifikasi independen yang memadai. Pemberitaan ini belum sepenuhnya menggali kebenaran substantif di balik konflik karena kurangnya data pendukung dan analisis mendalam tentang implikasi proyek bagi masyarakat.

2. Loyalitas

Dalam hal kesetiaan kepada warga, Floresa berhasil memposisikan masyarakat sebagai subjek utama pemberitaan. Media ini tidak hanya melaporkan aksi unjuk rasa, tetapi juga menyoroti kekhawatiran warga tentang ancaman terhadap ruang hidup mereka. Penyertaan rekomendasi tim independen KfW yang meminta penghentian proyek menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan kepentingan publik. Namun, kesetiaan kepada warga belum sepenuhnya optimal karena pemberitaan lebih banyak menyajikan suara tokoh-tokoh tertentu daripada warga biasa yang terdampak langsung, serta kurang mengangkat suara kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat yang mungkin paling merasakan dampak proyek.

3. Disiplin Verifikasi

Penerapan disiplin verifikasi dalam pemberitaan ini terlihat melalui pencantuman sumber informasi secara jelas dan penandaan pernyataan-pernyataan yang masih bersifat klaim. Floresa menggunakan kata "mengklaim" ketika melaporkan pernyataan Raymundus tentang jumlah

peserta aksi, menunjukkan kesadaran akan pentingnya verifikasi. Namun, media ini belum secara konsisten menerapkan prinsip verifikasi secara mendalam, terutama untuk pernyataan-pernyataan kontroversial seperti tuduhan provokasi atau klaim ilmiah tentang dampak proyek. Tidak adanya cross-check dengan ahli independen atau dokumen pendukung membuat beberapa bagian pemberitaan masih rentan terhadap bias dan ketidakakuratan.

4. Independensi

Floresa secara umum berhasil menjaga independensi dengan menyajikan berita secara netral dan tidak terlihat memihak secara eksplisit kepada salah satu kelompok. Pemberitaan memberikan porsi yang seimbang bagi narasi pro dan kontra proyek, serta mengungkap latar belakang masing-masing pihak secara transparan. Namun, independensi ini masih terbatas pada level pelaporan konflik horizontal antara warga dan Gereja, sementara kurang mengkritisi peran aktor-aktor kuat seperti pemerintah daerah dan PT PLN. Ketergantungan pada narasumber yang terbatas juga berpotensi mempengaruhi objektivitas pemberitaan.

5. Pemantau Kekuasaan

Sebagai pemantau kekuasaan, Floresa telah melakukan upaya awal dengan melaporkan sikap resmi pemerintah dan mengungkap potensi konflik kepentingan. Namun, fungsi watchdog belum berjalan optimal karena kurangnya investigasi mendalam terhadap proses pengambilan keputusan proyek, relasi kuasa antara pemerintah dan perusahaan, serta analisis kritis

terhadap dokumen-dokumen resmi terkait proyek. Pemberitaan lebih banyak fokus pada konflik permukaan daripada mengungkap struktur kekuasaan yang lebih luas yang melatarbelakangi konflik ini.

Analisis terhadap implementasi lima elemen jurnalisme dalam pemberitaan Floresa menunjukkan bahwa media ini telah memenuhi beberapa prinsip dasar jurnalisme, khususnya dalam hal penyajian berita yang berimbang dan komitmen terhadap kepentingan publik. Namun, terdapat beberapa kelemahan signifikan, terutama dalam hal kedalaman verifikasi, keberanian mengkritisi kekuasaan, dan inklusivitas suara masyarakat terdampak. Untuk meningkatkan kualitas jurnalistiknya, Floresa perlu lebih agresif dalam melakukan investigasi, memperluas jangkauan narasumber, dan lebih berani mengungkap praktik-praktik tidak transparan di balik konflik ini. Penyempurnaan dalam hal-hal tersebut akan membuat pemberitaan tidak hanya informatif tetapi juga benar-benar memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Tabel Interpretasi Berita 4

Warga Pendukung Geothermal Poco Leok Gelar Unjuk Rasa; Dukung

Langkah Nabit dan Persoalkan Sikap Gereja Katolik

Edisi: Selasa, 22 April 2025

Kebenaran	Elemen pertama jurnalisme, kebenaran, tercermin dalam pemberitaan ini melalui upaya Floresa untuk menyajikan fakta secara berimbang dengan memuat perspektif kedua belah pihak baik pendukung maupun penentang proyek geothermal Poco Leok.
Loyalitas	Elemen kesetiaan kepada warga dalam jurnalisme terlihat dari upaya Floresa untuk memposisikan masyarakat sebagai subjek utama pemberitaan, bukan sekadar objek konflik.
Disiplin Verifikasi	Penerapan disiplin verifikasi dalam pemberitaan ini terlihat melalui upaya Floresa untuk mencantumkan sumber informasi secara jelas dan menandai pernyataan-pernyataan yang masih bersifat klaim (seperti penggunaan kata "mengklaim" untuk pernyataan Raymundus Wajong).
Independensi	Pemberitaan Floresa tentang konflik geothermal Poco Leok menunjukkan upaya menjaga independensi melalui penyajian perspektif berimbang antara pendukung dan penentang proyek, tanpa intervensi opini redaksional yang terlihat jelas.

Pemantau Kekuasaan	Pemberitaan Floresa tentang konflik geotermal Poco Leok menunjukkan upaya awal dalam menjalankan fungsi pemantauan kekuasaan melalui pelaporan sikap resmi pemerintah dan pengungkapan potensi konflik kepentingan, termasuk hubungan keluarga antara tokoh pendukung proyek dengan mantan aparat keamanan.
-------------------------------	---

5.2.1.5 Interpretasi Berita 5: Disinformasi: Unjuk Rasa Warga Poco Leok Diprovokasi LSM, Media Lokal dan Lembaga Gereja

Pemberitaan Floresa.co tentang konflik Poco Leok menyoroti unjuk rasa warga terhadap proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5-6 di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Berita ini mengungkap bagaimana warga Poco Leok melakukan protes terhadap pemerintah daerah yang dianggap mengabaikan hak-hak masyarakat adat, sementara di sisi lain media-media tertentu menyebarkan disinformasi bahwa aksi warga diprovokasi oleh LSM dan lembaga gereja. Floresa.co hadir sebagai penyeimbang dengan memberikan fakta-fakta lapangan yang diverifikasi langsung dari narasumber utama, sekaligus membongkar praktik-praktik kekerasan dan intimidasi yang dialami warga.

1. Kebenaran

Floresa.co secara konsisten menerapkan prinsip kebenaran sebagai landasan utama jurnalisme. Media ini tidak hanya mengutip pernyataan resmi pemerintah atau pihak perusahaan, tetapi secara aktif melakukan verifikasi

langsung dengan warga Poco Leok sebagai subjek utama berita. Fakta-fakta yang disajikan seperti penolakan warga terhadap tuduhan provokasi, pengakuan langsung tentang intimidasi yang dialami, serta klarifikasi mengenai permintaan maaf yang diputarbalikkan, menunjukkan komitmen kuat terhadap akurasi informasi. Yang patut dicatat adalah upaya Floresa.co melacak rekam jejak disinformasi media-media tertentu terkait isu ini, membuktikan bahwa kebenaran dalam jurnalisme bukan sekadar melaporkan apa yang terjadi, tetapi juga meluruskan informasi yang sengaja diselewengkan.

2. Loyalitas

Elemen ini terlihat jelas dalam pemberitaan Floresa.co yang secara tegas memposisikan diri sebagai penyambung lidah masyarakat yang terpinggirkan. Berbeda dengan media lain yang cenderung memojokkan warga, Floresa.co memberikan ruang luas bagi suara-suara warga Poco Leok untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka. Pilihan untuk mewawancarai langsung korban intimidasi, memuat pernyataan penolakan terhadap disinformasi, serta mengungkap ketidakadilan sistemik yang dialami masyarakat, menunjukkan loyalitas media ini kepada publik sebagai pemegang kepentingan utama. Kesetiaan ini bukan hanya retorika, tetapi diwujudkan dalam kerja jurnalistik yang memprioritaskan kepentingan masyarakat adat yang hak-haknya terancam.

3. Disiplin Verifikasi

Floresa.co menunjukkan penerapan disiplin verifikasi yang ketat dalam peliputannya. Setiap klaim yang berkembang, baik dari pihak pemerintah maupun media lainnya, diverifikasi secara langsung dengan sumber-sumber primer di lapangan. Proses verifikasi ini tidak hanya dilakukan untuk peristiwa terkini, tetapi juga melacak pola-pola disinformasi yang berulang. Contoh nyata adalah ketika media ini tidak hanya menerima begitu saja klaim "warga meminta maaf" yang disebarkan media tertentu, tetapi mengecek langsung ke narasumber utama dan menemukan fakta sebaliknya - bahwa justru bupati yang meminta maaf. Pendekatan verifikasi semacam ini membedakan jurnalisme profesional dari sekadar penyebaran informasi tanpa filter.

4. Independensi

Dalam konflik yang melibatkan berbagai kepentingan kuat ini, Floresa.co berhasil mempertahankan independensinya. Media ini tidak terjebak menjadi corong pemerintah maupun LSM tertentu, tetapi tetap kritis terhadap semua pihak. Independensi ini terlihat dari keberanian mengkritik pemerintah daerah sekaligus membantah narasi-narasi yang dibangun media pro-pemerintah, tanpa kemudian serta merta mengadopsi pandangan kelompok oposisi. Yang lebih penting, independensi dan editorial Floresa.co memungkinkan mereka melakukan peliputan yang objektif tanpa tekanan dari pemilik modal atau kepentingan politik tertentu. Sikap independen ini menjadi prasyarat penting untuk menghasilkan jurnalisme yang benar-benar berpihak pada kebenaran.

5. Pemantau Kekuasaan

Fungsi utama jurnalisme sebagai pemantau kekuasaan diwujudkan Flores.co dengan sangat baik. Media ini tidak hanya melaporkan peristiwa unjuk rasa, tetapi secara aktif mengawasi dan mengungkap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Mulai dari tindakan represif bupati yang memimpin massa tandingan, pola disinformasi yang diduga sistematis dari media-media tertentu, hingga pengabaian prosedur FPIC (Free, Prior and Informed Consent) dalam proyek geotermal. Dengan melakukan fungsi watchdog ini, Flores.co tidak sekadar memberitakan, tetapi ikut menjaga akuntabilitas kekuasaan dan melindungi hak-hak masyarakat dari kesewenang-wenangan.

Analisis terhadap pemberitaan Flores.co tentang konflik Poco Leok menunjukkan penerapan kelima elemen jurnalisme secara komprehensif dan konsisten. Dari kebenaran sebagai fondasi, kesetiaan pada warga sebagai kompas moral, disiplin verifikasi sebagai metode kerja, independensi sebagai prinsip etik, hingga fungsi pemantau kekuasaan sebagai peran sosial. Penerapan kelima elemen ini tidak hanya menghasilkan peliputan yang berkualitas, tetapi juga menjadikan jurnalisme sebagai kekuatan penyeimbang dalam demokrasi. Di tengah maraknya disinformasi dan jurnalisme yang tunduk pada kekuasaan, kerja Flores.co dalam kasus ini menjadi contoh bagaimana jurnalisme seharusnya berfungsi - sebagai penjaga kebenaran dan pembela kepentingan publik, khususnya kelompok yang terpinggirkan. Keberhasilan menerapkan kelima elemen ini sekaligus menjadi

kritik implisit terhadap praktik jurnalisme yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar tersebut.

Tabel Interpretasi Berita 5

Disinformasi: Unjuk Rasa Warga Poco Leok Diprovokasi LSM, Media Lokal dan Lembaga Gereja

Edisi: Senin, 9 Juni 2025

Kebenaran	Elemen pertama jurnalisme, yaitu kebenaran (truth), menegaskan bahwa jurnalisme harus selalu berlandaskan fakta yang akurat, diverifikasi, dan disajikan secara berimbang.
Loyalitas	Dalam konteks pemberitaan Flores.co tentang konflik Poco Leok, kesetiaan ini tercermin dari upaya media tersebut untuk memprioritaskan suara warga yang menjadi korban disinformasi, membongkar manipulasi fakta oleh media lain, serta mengungkap praktik intimidasi dan kekerasan yang dialami masyarakat.
Disiplin Verifikasi	Elemen ketiga jurnalisme, disiplin verifikasi, merupakan jantung dari praktik jurnalistik yang

	bertanggung jawab. Prinsip ini menuntut jurnalis untuk tidak sekadar melaporkan informasi, tetapi secara sistematis memeriksa kebenarannya melalui metode verifikasi yang ketat sebelum disebarkan ke publik.
Independensi	Dalam konteks pemberitaan Flores.co tentang konflik Poco Leok, independensi tercermin dari keberanian media tersebut untuk tidak menjadi corong pemerintah maupun LSM, melainkan konsisten menyajikan fakta berdasarkan verifikasi lapangan dan kesaksian langsung warga.
Pemantau Kekuasaan	Dalam konteks pemberitaan Flores.co tentang konflik Poco Leok, fungsi watchdog ini terwujud melalui keberanian mengungkap tindakan represif pemerintah daerah, membongkar disinformasi sistematis yang dikendalikan penguasa, serta memberikan ruang bagi suara warga yang terpinggirkan.